



# DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP  
2025

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur diucapkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan RidhoNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai bentuk tanggungjawab terhadap Negara untuk melaporkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan sebagai salah satu Instansi Pemerintah.

Laporan ini dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja Instansi Dinas Pendidikan Kota Binjai terhadap Penggunaan Anggaran Tahun 2025.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, berikut ini kami sajikan Laporan Kinerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Dalam pembuatan Laporan Kinerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan, namun dengan semaksimal mungkin kami berusaha untuk menyelesaikan dengan harapan dapat bermanfaat untuk mendorong terciptanya Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Akhirnya dengan harapan Laporan Kinerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini dapat bermanfaat sebagai Bahan Kajian untuk perbaikan Perencanaan di masa yang akan datang.

Terima Kasih,

Binjai, 27 Februari 2026

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BINJAI**



**SOFYAN SYAHPUTRA SIREGAR, S.STP, M.AP**  
**PEMBINA UTAMA**  
**NIP. 19870331 200602 1 001**

---

**DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Susunan Organisasi .....	3
D. Tugas, Pokok dan Fungsi .....	4
E. Sumber Daya Manusia .....	10
F. Sistematika Penyajian .....	18
<b>BAB II     PERENCANAAN STRATEGIS</b> .....	<b>19</b>
A. Visi dan Misi .....	19
B. Tujuan dan Sasaran .....	20
C. Strategi .....	21
D. Perencanaan Kinerja .....	23
E. Penetapan Kinerja .....	24
F. Target Anggaran .....	28
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>30</b>
A. Capaian Kinerja Utama .....	30
B. Analisis Capaian Kinerja Tiap Sasaran .....	33
C. Akuntabilitas Keuangan .....	39
D. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	40
E. Strategi Pemecahan Masalah .....	41
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	<b>42</b>
Lampiran 1: Laporan Realisasi Anggaran Ta.2024	

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Dinas Pendidikan Kota Binjai menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 sebagai bentuk Pertanggung Jawaban terhadap Pelaksanaan Kinerja dengan mempedomani Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8.2003 tanggal 25 Maret 2003.

Sasaran Strategi yang ditetapkan dapat dicapai sebanyak 5 (lima) hal, yaitu :

1. Peningkatan Akses Pendidikan (100%);
2. Peningkatan Mutu Pendidikan (100%);
3. Peningkatan Manajemen Pendidikan (100%);
4. Peningkatan Kreativitas, Bakat dan Kemampuan Siswa (100%);
5. Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah (100%);

Untuk tahun mendatang akan terus melakukan upaya Meningkatkan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami Renstra dan LAKIP, melakukan Pendekatan Pro Aktif kepada Pemerintah Daerah dan Pihak Legislatif dalam upaya merumuskan Kebijakan Pengawas Daerah, Pemberantasan KKN maupun Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah serta dapat berperan aktif dalam Pengembangan Bidang Pengawasan dengan Organisasi diluar Pemerintah.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Di tengah dinamika perubahan global yang berlangsung sangat pesat, penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu prinsip utama dalam *good governance* adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan seluruh sumber daya dalam pelaksanaan pemerintahan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan amanah yang diemban.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pejabat eselon II ke atas diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta kebijakan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan, yang berpedoman pada dokumen perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya. Secara teknis dan substantif, penyusunan LAKIP mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintah daerah kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pembangunan dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD).

Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini juga disusun karena memenuhi amanat dari peraturan perundangan terkait Penyusunan LAKIP sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kota Binjai Tahun 2025, adalah:

1. Mewujudkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan yang dipercayakan;
2. Mengevaluasi Kinerja Kegiatan untuk menentukan Keberhasilan/Kegagalan Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Kota Binjai selama Tahun 2025;
3. Mengevaluasi Keberhasilan/Kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2025.

### **• Geografis, Topografi dan Iklim**

Kota Binjai secara geografis terletak di Provinsi Sumatera Utara pada kisaran 3°31'–3°40' Lintang Utara dan 98°27'–98°32' Bujur Timur. Wilayah Kota Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah utara, barat, dan selatan, serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur. Luas wilayah Berkisar 9.023 Km<sup>2</sup>, terbagi atas 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan. Dari sisi topografi, Kota Binjai didominasi oleh dataran rendah hingga bergelombang ringan, dengan ketinggian wilayah

yang relatif seragam. Kondisi ini mendukung pengembangan kawasan permukiman, infrastruktur perkotaan, serta aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1986, Wilayah Kota Binjai berbatasan dengan:

- ***Sebelah Utara*** dengan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hampan Kabupaten Deli Serdang;
- ***Sebelah Selatan*** dengan Kecamatan Sei. Bingai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kuta Limbu Kabupaten Deli Serdang;
- ***Sebelah Timur*** dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- ***Sebelah Barat*** dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

Kota Binjai beriklim tropis basah, dengan dua musim utama yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan relatif tinggi sepanjang tahun dengan kelembapan udara yang cukup besar, sedangkan suhu udara umumnya berada pada kisaran hangat hingga panas. Karakteristik iklim tersebut berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, serta pengelolaan lingkungan dan infrastruktur perkotaan.

### C. SUSUNAN ORGANISASI

Untuk mendukung Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah telah dibentuk Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Ketentuan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor : 26 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai maka disusun Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pendidikan Kota Binjai, terdiri dari:

1. Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan PAUD
  - b. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD
  - c. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar
  - b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
  - c. Seksi Kelembagaan Sarana, Prasarana dan Akreditasi SD/SMP
5. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:
  - a. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
  - b. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SD
  - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMP
6. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Dinas Pendidikan merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
2. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendidikan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan ;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayananan umum di bidang pendidikan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
4. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;

5. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Binjai

**TUGAS**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dibantu oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Tim Perencanaan Keuangan. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program.

**FUNGSI**

- a. Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, bidang umum dan kepegawaian, perencanaan evaluasi dan pelaporan (PEP), serta keuangan;
- b. Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, Perencanaan Evaluasi Pelaporan (PEP) serta keuangan;
- c. Melaksanakan pengendalian tugas dan fungsi pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan dinas;
- d. Menyusun program kegiatan bidang, umum dan kepegawaian, keuangan monitoring serta program perencanaan evaluasi dan pelaporan dinas;
- e. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;
- g. Melaksanakan dan mengelola bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan;
- h. Melaksanakan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi dilingkungan Dinas;
- i. Menyusun program kegiatan bidang, umum dan kepegawaian, keuangan monitoring serta evaluasi data dan pelaporan dinas;

- j. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
- k. Menyusun penerapan Laporan Standar Pelayanan Minimal;
- l. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- m. Menyusun Laporan Kinerja (LKj), dan Perjanjian Kinerja (PK);
- n. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- o. Melaksanakan pengelolaan tata naskah, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- p. Menyusun analisa jabatan dan analisis beban kerja;
- q. Melaksanakan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset dinas;
- r. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;
- s. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana dilingkup dinas;
- t. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan dinas;
- u. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;

## **2) Bidang Pembinaan Paud Dan Pendidikan Masyarakat**

### **TUGAS**

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh Kepala Seksi Pembinaan PAUD, Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

### **FUNGSI**

- a. Melaksanakan pengkajian pelaksanaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Bagian di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- c. Melaksanakan, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- d. melaksanakan, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan

- mengevaluasi pelaksanaan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- e. Melaksanakan, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pemberian Fasilitas di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
  - f. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
  - g. Melaksanakan, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan koordinasi dan integrasi di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
  - h. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
  - i. Membuat laporan pelaksanaan fungsi dan tugasnya;
  - j. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
  - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
  - l. Melaksanakan pengembangan program di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
  - m. Melaksanakan pengembangan sumberdaya di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat sesuai kebutuhan daerah;
  - o. Melaksanakan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;  
dan
  - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

#### TUGAS

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang dibantu oleh Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar, Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Akreditasi SD/SMP. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

#### FUNGSI

- a. Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, bidang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. Melaksanakan kegiatan program, pembinaan dan pengembangan Teknologi Pendidikan;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- d. Melaksanakan pengkoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya terkait program pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat;
- e. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;
- g. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan program pendidikan untuk SD dan SMP atau yang sederajat, pembinaan dan pengembangan Teknologi Pendidikan, Kurikulum Pendidikan, Pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat, dan menetapkan Kalender Pendidikan, sistem Penerimaan Siswa Baru dan Ujian Akhir Sekolah (UAS);
- h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data program-program pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait program pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat, pembinaan dan pengembangan Teknologi Pendidikan, Kurikulum Pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat;

- j. Melaksanakan rekomendasi/izin pendirian pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat;
- k. Melaksanakan rekomendasi mutasi siswa/validasi siswa;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4) Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan**

##### **TUGAS**

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dibantu oleh Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SD dan Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMP

##### **FUNGSI**

- a. Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan bidang guru dan tenaga kependidikan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, dan pengolahan data pengelolaan formasi, pengembangan dan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang guru dan tenaga kependidikan;
- d. Melaksanakan pengkoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya terkait pengelolaan formasi, pengembangan dan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;
- g. Melaksanakan rencana kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pengolahan formasi, pengembangan, evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan;
- h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, data pengelolaan

formasi, pengembangan dan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan;

- i. Melaksanakan kegiatan pengelolaan formasi, pengembangan dan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pengelolaan formasi, pengembangan dan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5) Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai prosedur ketentuan yang berlaku;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan undangan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai Peraturan Perundang-Undangan

#### **E. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Pada Tahun 2025 jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Binjai sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>N I P</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan</b>
1	Sofyan Syahputra Siregar, S.TP, M.AP.	19870331 200602 1 001	IV/b	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
<b>SEKRETARIAT</b>				
1	Alexander Zulkarnain Hsb, S.E	19760603 201001 1 014	III/d	Sekretaris
2	Andika Sapuanda, S.pd	19850803 201103 1 002	III/c	Katim Perencanaan dan Keuangan
3	Irma Lestari Silaban, S.E	19970119 202012 2 010	III/b	Bendahara
4	Ratna Julifah, SE	19680725 200701 2 005	III/b	Analisis Laporan Keuangan
5	Eis Hardayani, S.Kom	19810828 200101 2 001	III/c	Analisis Pengembangan Sistem Perbendaharaan
6	Oni Novizar Ardiansyah, S.pd	19881101 201402 1 001	III/c	Aanalisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan
7	Fitri Khairani, S.Kom	19980207 202505 2 002	III/a	Analisis Perencanaan
8	Lira Savina, S.Kom	20020622 202505 2 001	III/a	Pengelola Program dan Kegiatan
9	Wilda El Chaira	19850414 202521 2 015	V	Pengadministrasi Perkantoran
10	Subakat Malik, SE	19880705 201001 1 008	III/d	Ka. Subbag. Umum dan Kepegawaian
11	Siti Nurhasanah, A.Ma,Pd	19800918 201001 1 008	III/d	Pengelola Kepegawaian
12	Didiek Novrizal, S.Pd	19800918 201001 1 018	III/d	Analisis Pelayanan Publik

<b>BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>				
<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>N I P</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan</b>
1	Dr. Roma Putra, M.Pd	19811221 201101 1 008	IV/b	Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat
2	Nuryanto, S.Pd	19751028 201001 1 008	III/d	Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD
3	Zulham, S.Pd	19810201 201003 1 001	III/d	Analisis Pengembangan Peserta Didik
4	Ikhda Hasnita Winda Sari, S.Pd	19880228 201001 2 023	III/d	Katim Pembinaan PAUD
5	Khairil Anwar, S.T	19750116 201212 1 001	III/c	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6	Jumiah, S.Pd	19710820 201212 2 002	III/b	Penyusun Program Pengembangan PAUD
7	Eko Setiawan Sitepu, S.Pd	19830703 201001 1 026	III/d	Kasi. Pembinaan Pendidikan Masyarakat
8	Amalia, S.Pd	19840727 200604 2 012	III/c	Analisis Kursus & Kesetaraan
9	Rina Safrina	19851022 201406 2 002	III/b	Analisis kelembagaan kursus dan Pelatihan
10	Lindung Ginting	19830805 2001101 1 010	III/a	Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan
11	Maya Sari Sitepu, S.Pd	19861201 200903 2 006	III/d	Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan
12	Muhammad Effendi Rangkuti	19820526 202521 1 015	V	Pengadministrasi Perkantoran

<b>BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR</b>				
No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
1	Auzar Habibie Marpauang, SE	19840506 200901 1 001	III/d	Plt. Kabid Pendidikan Dasar
2	Auzar Habibie Marpaung, SE	19840506 200901 1 001	III/d	Kasi Kelembagaan Sarana, Prasarana dan Akreditasi SD/SMP
3	Dian Anggraini, S.Pd	19830918 201001 2 027	III/c	Katim Pembina SD
4	Elfi Rahmadani Pulungan, S.Pd.I, M.M	19820709 200903 2 008	III/d	Analisis Pengembangan Satuan Pendidikan SD
5	Yurnida Tanjung, S.Pd	19840602 201003 2 001	III/d	Analisis Pengembangan Peserta Didik
6	Chaisal Andrio Lubis, S.Pd	19820617 200903 1003	III/c	Kasi Pembina SMP
7	Karmila, S.Pd	19780202 202521 2 005	IX	Analisis Pengembangan Satuan Pendidikan SMP
8	Thohap Gayatri Puspa Kirana Br Sianturi	19920303 202521 2 019	V	Pengadministrasi Perkantoran

<b>BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>				
No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
1	Dra. Ollyvia Agustien S.	19690818 199403 2 002	IV/a	Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan
2	Adri Rivanto, S.STP	19830801 200112 1 004	IV/b	Kasi GTK PAUD dan Pendidikan Masyarakat
3	Siti Fatimah Hanum Sinulingga	19790215 201212 2 002	III/c	Katim Pembinaan SMP
4	Khairul Zaman	19730717 201212 1 004	II/c	Pengadministrasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5	Firmansyah Putra Surbakti, SH	19831009 200903 1 007	III/d	Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan SD
6	Yocky Agustian, S.Pd	19840812 201101 1 001	III/c	Analisis Kualifikasi dan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
7	Siti Rahma Dani	20011212 202521 2 004	V	Pengadministrasi Perkantoran
8	Radiansyah PA, S.Pd	19831030 201101 1 012	III/c	Analisis Data dan Informasi Pendidikan

<b>Tenaga Fungsional (Penilik)</b>				
No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
1	M. Tasril Hasibuan,S.Pd	19700410 199801 1 001	IV/a	Penilik Luar Sekolah
2	M. Nuh S,Ag	19720409 200502 1 001	IV/a	Penilik Luar Sekolah
3	Leni Marlina Sitanggang, S. Pd	19750520 201001 2 016	III/c	Penilik Luar Sekolah
4	Ernita Septiana, S.Pd	19860903 200903 2 006	III/d	Penilik Luar Sekolah

<b>Pegawai Harian Lepas Dinas Pendidikan</b>				
No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
1	Nurmala Nasution	-	-	Operator Komputer
2	Dedi Sambimbo	-	-	Operator Komputer
3	M.Yusra Mauli Riansyah	-	-	Operator Komputer
4	Lestianovika Ginting	-	-	Operator Komputer
5	Tomy Dandi Wahyu	-	-	Operator Komputer
6	Citra Utami	-	-	Operator Komputer
7	M. Luthfi Daulay	-	-	Petugas Pengantar Surat
8	Mustafa Humaidi	-	-	Operator Komputer
9	Emi	-	-	Petugas Kebersihan
10	Cellystia Dianora Diaz	-	-	Operator Komputer
11	Hana Hesia Br.Ginting	-	-	Operator Komputer
12	M. Robby Kasno	-	-	Operator Komputer
13	Dapid Ceacer Ginting	-	-	Operator Komputer
14	Febri Anggara Malik	-	-	Operator Komputer
15	Eva Sasmita	-	-	Operator Komputer

16	Umar Danu, S.Pd	-	-	Petugas Keamanan
17	Mutia Agustin Br Sormin	-	-	Operator Komputer
18	Awi Zera Filia, S.Kom	-	-	Operator Komputer
19	Mhd. Ardiansyah Prayogi, S.H	-	-	Petugas Pengantar Surat
20	Emia Ciciona Sinuraya	-	-	Operator Komputer
21	Ayu Dia	-	-	Operator Komputer
22	Jepri Andri Irianto	-	-	Operator Komputer
23	Titi Miranti	-	-	Operator Komputer
24	Dea Ersyafitri	-	-	Operator Komputer
25	Nurmala Nasution	-	-	Operator Komputer
26	Dimas Harmianto Utomo	-	-	Operator Komputer
27	Tiarma Pebrinita Br Tarigan	-	-	Operator Komputer
28	Dedi Iswandi	-	-	Petugas Keamanan
29	Veni Aulita	-	-	Petugas Kebersihan
30	Nurhayati	-	-	Petugas Kebersihan

<b>Pegawai Pengawas Dinas Pendidikan Kota Binjai</b>				
1	Jaini, S.Pd	19660809 198809 1 002	IV/b	JF Pengawas Sekolah Madya
2	Purwanto, S.Pd	19700423 199412 1 001	IV/b	JF Pengawas Sekolah Madya
3	Mariana, S.Pd,M.Pd	19671010 199112 2 001	IV/b	JF Pengawas Sekolah Madya
4	Maulana Edi Saputra, S.Pd	19700313 199801 1 001	IV/b	JF Pengawas Sekolah Madya
5	Juriah Daulay. S.Pd	19710202 199305 2 002	IV/b	JF Pengawas Sekolah Madya
6	Tukino, S.Pd.SD, M.Pd	19700504 199305 100 1	IV/a	JF Pengawas Sekolah Madya
7	Dra. Juniar	19670615 199501 2 002	IV/a	JF Pengawas Sekolah Madya
8	Syapi'i Nasution, A.Ma.Pd	19671231 198807 1 001	IV/a	JF Pengawas Sekolah Madya

9	Lewi Sapada, Hsb, S.Pd., M.Psi	19700529 200502 1 002	IV/b	JF Pengawas Sekolah Madya
10	Rita Syahyana, S.Sos	19740112 200604 2 002	IV/a	JF Pengawas Sekolah Madya
11	Hidayati Ritonga, S.Pd	19781024 200003 2 002	IV/a	JF Pengawas Sekolah Madya
12	Yunita Safitri, S.Pd	19690620 200604 2 006	IV/a	JF Pengawas Sekolah Madya
13	Sariman Parulian Sagala, S.Pd	19781215 200604 1 005	IV/a	JF Pengawas Sekolah Madya
14	Mutiara Lubis, S.Pd	19800326 200502 2 002	III/d	JF Pengawas Sekolah Madya
15	Lisma Irayani, S.Pd., M.Pd	19780924 200701 2 002	IV/a	JF Pengawas Sekolah Madya
16	Desti Novianti Nasution, S.Pd	19911122 201503 2 002	III/c	JF Pengawas Sekolah Madya
17	Gunsar Limbong, S.Pd	19840929 200804 1 001	III/d	JF Pengawas Sekolah Madya
18	Yani Periasih, S.Pd	19740908 200903 2 002	III/d	JF Pengawas Sekolah Madya
19	Adriati, S.Pd	19720814 199703 2 002	IV/b	JF Pengawas Sekolah Madya
<b>Pegawai SPNF SKB Dinas Pendidikan Kota Binjai</b>				
1	Drs. H. Arwin Kawakib Nasution, M.M	19690912 199801 1 002	IV/a	Kepala SPNF SKB
2	Sri Rahayu Ningsih	19760122 200701 2 001	IV/a	Penelaah Teknis Kebijakan
3	Nurasiah, S.Pd	19840802 200903 2 013	III/d	Pamong Belajar Muda
4	Suharti	19710325 199301 2 001	III/d	Pengadministrasi Perkantoran
5	Afrizal Bukhari, S.Pd	19780415 200903 1 004	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
6	Desti Irmayani, S.Pd	19821201 201003 2 001	III/b	Pamong Belajar Pertama
7	Yuki Puspita	19850818 201212 2 003	III/a	Pamong Belajar Pertama
8	Anita Julianti, S.Pd	19830701 201406 2 004	III/a	Pamong Belajar Pertama
9	M. Reza Pahlevi, S.Pd	19880602 201505 1 001	III/a	Pamong Belajar Pertama
10	Rusmiati, S.Pd.I	19790422 201406 2 002	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan
11	Syafriah Harahap	19740713 201212 2 002	II/b	Pengadministrasi Umum

12	Tuti Ardia Ningsih	19850516 202521 2 018	V	Pengadministrasi Umum
<b>UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Binjai Kota</b>				
<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>N I P</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan</b>
1	Syafrizal	19750122 202521 1 006	V	Staf/Koordinator
<b>UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Binjai Selatan</b>				
<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>N I P</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan</b>
1	Syabaruddin Nasution	19740112 202521 1 006	V	Staf/Koordinator
<b>UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Binjai Utara</b>				
<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>N I P</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan</b>
1	H. Irwan Khotib Harahap, S.Sos	19670112 199308 1 001	III/d	Staf/Koordinator
2	Ahmad Kurniadi, A.Ma.Pd	19821118 201001 1 021	II/c	Staf/Koordinator
<b>Tenaga Harian Lepas UPT. Dinas Pendidikan Kota Binjai</b>				
<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>N I P</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan</b>
1	Devi Yanti	-	-	Tenaga Harian Lepas UPT. Dinas Pendidikan Binjai Kota
2	Yulia Wulandari, S.Pd	-	-	Tenaga Harian Lepas UPT. Dinas Pendidikan Binjai Utara
3	Anita Pratiwi, S.Pd	-	-	Tenaga Harian Lepas UPT. Dinas Pendidikan Binjai Utara
4	Muhammad Khairul Fikri	-	-	Tenaga Harian Lepas SKB

## F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka format penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari:

### **Ikhtisar Eksekutif:**

Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD dan sejauh mana Pemerintah Daerah telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pencapaiannya serta langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut serta kendala-kendala dalam Penyusunan LAKIP Tahun 2025.

- BAB I : Menggambarkan Penjelasan Umum Organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.
- BAB II : Menggambarkan Bentuk Perencanaan Strategis yang merupakan Ringkasan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Utama dan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025.
- BAB III : Menggambarkan Akuntabilitas Kinerja yang mencakup Capaian Kinerja Utama (capaian kinerja makro) dan Capaian Kinerja Sasaran dan Tujuan serta Analisis Capaian Kinerja Sasaran dan Tujuan serta Gambaran Alokasi dan Realisasi Anggaran dari setiap program yang ditetapkan dalam APBD.
- BAB IV : Merupakan Penutupan yang memuat Kesimpulan dan Saran sebagai Umpan Balik untuk Tahun mendatang.

Disamping itu sebagai Data Pendukung juga dilampirkan Rencana Kinerja Tahunan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dan lain-lain yang dianggap Relevan.

## BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

### A. VISI DAN MISI

#### a. Pernyataan Visi

Visi adalah Cara Pandang Jauh Kedepan tentang Kemana Instansi Pemerintah Harus dibangun agar dapat Eksis, Antisipasif dan Inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Binjai. Perumusan Visi menggambarkan keadaan menyeluruh yang harus dicapai sejalan dengan cita-cita masyarakat, berdasarkan berbagai karakteristik daerah yang ada, maka disusunlah Visi Dinas Pendidikan Kota Binjai sebagai berikut:

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Bermutu, Berakhlak Mulia, Maju dan Sejahtera Melalui Pendidikan.

Penjelasan arti Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan berakhlak mulia adalah suatu potensi masyarakat untuk maju dan sejahtera melalui Pendidikan.**
- 2. Pendidikan adalah Usaha Sadar menanamkan pengetahuan, sikap dan moral, serta keterampilan.**

#### b. Pernyataan Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan Tujuan Instansi Pemerintah dan Sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (Stake Holder) dan memberi peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah Misi Dinas Pendidikan Kota Binjai sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana yang bermutu untuk mendukung Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 (Sembilan) Tahun yang Demokratis.**
- 2. Peningkatan Manajemen/Profesionalisme, Sertifikasi Penyetaraan dan Penambahan Tenaga Pendidikan.**
- 3. Peningkatan Mutu Pendidikan, Kreativitas, Nilai Akademik dan Lulusan yang Berakhlak Mulia.**
- 4. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.**
- 5. Menggalang Partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Dunia Usaha.**

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Bagian Integrasi dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh yang di kerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP bagi Dinas Pendidikan Kota Binjai adalah Suatu Perwujudan dari Implementasi Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik di Kota Binjai. Sistem Pengendalian ini merupakan Infrastruktur bagi Manajemen Dinas Pendidikan Kota Binjai untuk memastikan bahwa Visi, Misi dan Tujuan Strategi Dinas Pendidikan Kota Binjai dapat dipenuhi melalui Implementasi Strategi Pencapaiannya (Program dan Kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, Siklus Sistem LAKIP diawali dengan Penyusunan Rencana Strategi yang mendefinisikan Visi, Misi dan Tujuan/Sasaran Strategi Dinas Pendidikan Kota Binjai. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan Program dan Kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka Pemenuhan Visi, Misi dan Tujuan/Sasaran Strategi tersebut. Sistem Pengukuran Kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Binjai yang dilaksanakan. Pada setiap akhir periode Pelaksanaan Program/Kegiatan, Pencapaian Kinerja yang berhasil dilaksanakan itu dikomunikasikan kepada para Stakeholder dalam Wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki 2 (dua) Fungsi Utama sekaligus:

1. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pendidikan Kota Binjai untuk menyampaikan Pertanggung Jawaban Kinerja kepada seluruh Stakeholder (Presiden, DPRD dan Masyarakat);
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana Evaluasi atas Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Binjai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Dua Fungsi Utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari Tujuan dan Sasaran Penyusunan dan Penyampaian LAKIP oleh setiap Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tujuan dan Sasaran Penyusunan dan Penyampaian LAKIP Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2025 mencakup hal-hal berikut ini:

→ **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan Eksternal Organisasi, menjadikan LAKIP 2025 sebagai Sarana Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kota Binjai atas Pencapaian Kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi dan juga melaporkan sampai sejauh mana Kinerja Dinas Pendidikan Kota Binjai serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi telah dicapai selama tahun 2025.

→ **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan Internal Organisasi menjadikan, LAKIP 2025 sebagai Sarana Evaluasi Pencapaian Kinerja oleh Manajemen Dinas Pendidikan Kota Binjai bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Manajemen Dinas Pendidikan Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian Kinerja Pemerintah Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### C. STRATEGI

Bertitik tolak dari nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan harga diri dari segenap Aparatur Dinas Pendidikan Kota Binjai dalam penyelenggaraan pengelolaan pembinaan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat, maka disusunlah sebuah perencanaan strategic yang diharapkan nanti dapat mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa.

Akuntabilitas Kinerja hanya dapat diwujudkan melalui transparansi dan iklim yang demokratis. Semakin bertambah majunya pola pemikiran masyarakat dimana masyarakat kita telah menyadari bahwa kekuasaan itu merupakan amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu masyarakat akan meminta pertanggung jawaban atas amanat yang telah diberikan tersebut.

Sejalan dengan itu Dinas Pendidikan Kota Binjai diharapkan mampu menjawab tantangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan yang baik, dengan demikian diperlukan Profesionalisme Aparatur, Transparansi dan Akuntabilitas disertai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam

upaya menciptakan pemerintahan yang baik (Good Government). Nilai-nilai tersebut diatas mendasari pernyataan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026, disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja Tahun 2025 menggambarkan Kinerja Pencapaian Sasaran Strategic yang ingin dicapai atau target kinerja tahun 2025 yang dengan orientasi pencapaian sasaran strategic tahunan. Target Kinerja ini menunjukkan hasil kuantitatif yang melekat pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategic maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2025 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas Operasional Dinas Pendidikan Kota Binjai sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2025 ini.

Berdasarkan pendekatan perencanaan yang menggunakan Rencana Kinerja Tahunan ini, akan tercermin adanya komitmen-komitmen baru terhadap perubahan kondisi yang sudah tidak sesuai lagi dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan Analisis Faktor Internal dan Eksternal pada tahap penyusunan Renstra. Perubahan kondisi tersebut bisa jadi menuntut dilakukannya segera rencana tindak yang akan mengakomodasikan dan sekaligus menunjukkan langkah antisipatif dan responsive terhadap perubahan kondisi lingkungan.

Langkah penyesuaian yang dilakukan dapat berupa penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan strategi pencapaiannya, meski tidak harus melakukan revisi lebih dahulu terhadap Renstra. Hal ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa Revisi Renstra akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus mengikuti Prosedur/Tata Cara Perubahan Peraturan Daerah, sebagaimana berlaku juga terhadap Renstra.

#### **D. PERENCANAAN KINERJA**

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan asli dari suatu penilaian (Assesment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator yang telah ditetapkan.

Evaluasi Kinerja dimulai dengan Pengukuran Kinerja Tingkat Kegiatan. Selanjutnya pencapaian kinerja sasaran dievaluasi dengan membandingkan capaian sasaran dengan target sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud disajikan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) untuk tiap-tiap sasaran Rencana Kinerja Tahun 2025, sedangkan pengukuran kinerja menggunakan format Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagaimana yang tersaji dalam lampiran.

Strategi-strategi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), sebagai berikut:

**1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar Arah Kebijakan :**

- a. Pemantapan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan

**2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Arah Kebijakan :**

- a. Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Peningkatan jumlah sertifikasi bagi pendidik
- c. Peningkatan kompetensi SDM dibidang budaya sebagai upaya menumbuhkan budaya local

**3. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca**

**Arah Kebijakan :**

- a. Penambahan koleksi buku dan peningkatan kualitas dilayanan baca

**4. Menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan (religiusitas) dan wawasan kebangsaan**

**Arah Kebijakan:**

- a. Peningkatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) melalui pengadaan fasilitas peningkatan kerukunan umat beragama
- b. Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan umat beragama
- c. Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan

**E. PENETAPAN KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Binjai, maka Dinas Pendidikan Kota Binjai mengemban tugas untuk melaksanakan pendidikan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas sebagai berikut :

**I. Pendidikan Dasar,**

1. Peserta Didik:
  - Masih tingginya Usia Sekolah Taman Kanak-Kanak yang belum bersekolah;
  - Masih ada DO dan belum sekolah pada Usia SD/MI, SMP/MTs;
  - Masih ada siswa yang mengulang pada tingkat SD/MI, SMP/MTs;
  - Masih rendahnya Perhatian orangtua terhadap anaknya khususnya bagi keluarga kurang mampu;
2. Kurikulum:
  - Penyempurnaan kurikulum lokal dan Kurikulum merdeka belajar sudah tahap menuju kesempurnaan ;
  - Pelaksanaan kurikulum lokal dan nasional belum mencapai target;
  - Belum ada rekayasa kurikulum untuk muatan lokal;
  - Supervisi pelaksanaan kurikulum oleh pengawas belum terlaksana dengan optimal;

3. Ketenagaan:

- Guru TK, SD/MI, SMP/MTs yang tidak merata dan masih kurang dan untuk SMP/MTs pada beberapa mata pelajaran;
- Kemampuan profesional Guru TK, SD/MI, SMP/MTs mengembangkan materi dan metode belum optimal;
- Guru TK, SD/MI, SMP/MTs masih ada yang berlatar belakang pendidikan yang tidak sesuai;
- Belum terlaksananya pemerataan guru secara efisien dan efektif;
- Tingkat kesejahteraan guru yang rendah khususnya guru non PNS;
- Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dan pengawas belum merata.

4. Prasarana dan Sarana:

- Taman Kanak-Kanak Negeri belum merata pada setiap Kecamatan baru ada pada Kecamatan Binjai Selatan dan Binjai Barat;
- Kondisi fisik maupun sarana dan prasarana TK belum memenuhi standard dan kondisi fisik SMP/MTs rusak ringan;
- Buku pelajaran dan buku penunjang belum mencapai ratio 1 : 1;
- Media pembelajaran cukup memadai pada tingkat SD/MI, SMP/MTs;
- Moubilier masih ada yang perlu diganti SD/MI, SMP/MTs.

5. Pengelolaan:

- Pengendalian/supervise oleh pengawas ke sekolah-sekolah belum berjalan dengan baik;
- Pelaporan dari sekolah tentang penyelenggaraan pendidikan belum baik;
- Sekolah yang di kelola swasta masih ada yang belum memenuhi standard;

## II. Pendidikan Menengah,

1. Peserta Didik:

- Lulusan SMP/MTs dari luar masih banyak mendaftar di Kota Binjai;
- Kemampuan ekonomi siswa yang masih terbatas;

- Angka Putus Sekolah masih ada;
  - Tingkat daya serap siswa masih rendah dan keterampilan, kreatifitas siswa sangat rendah dibandingkan dengan bursa kerja;
2. Kurikulum:
- Kemampuan guru untuk mengimplementasikan kurikulum belum mencapai target secara merata;
  - Penyempurnaan kurikulum belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja/dunia usaha;
  - Kegiatan supervise dan pengawasan kurikulum dan PMB oleh pengawas belum terlaksana dengan optimal;
  - Pelaksanaan PSG di Kota Binjai belum optimal karena belum tersedia industri yang sesuai dengan kebutuhan PSG.
3. Ketenagaan:
- Jumlah guru mata pelajaran SMP/MTs tidak merata;
  - Motivasi/kesadaran dan kinerja guru yang relatif rendah;
  - Pemerataan guru sulit di laksanakan;
  - Kinerja pengawas belum optimal;
  - Pembinaan dan pengembangan kemampuan guru, kepala sekolah, pengawas belum merata.
4. Sarana dan Prasarana:
- Menyebaran SMP/MTs belum merata pada setiap kecamatan;
  - Kondisi fisik bangunan dan peralatan lainnya banyak yang rusak;
  - Tingkat ratio buku dengan siswa tidak sebanding;
  - Alat Bantu pelajaran belum memadai dan moubilier masih ada ynag perlu diganti.
  - Tidak adanya lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru

### III. Pendidikan Luar Sekolah,

#### 1. Keluarga Belajar:

- Tempat/domisili warga belajar belum bervariasi;
- Sebagian besar warga belajar lebih tertarik bekerja dari pada belajar dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi;
- Sulit mendapatkan data putus sekolah dan anak cacat fisik;

#### 2. Kurikulum:

- Pelaksanaan kurikulum muatan lokal belum terlaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja;
- Jumlah kurikulum belum memadai;
- Modul-modul sangat terbatas dan media pembelajaran.

#### 3. Ketenagaan:

- Tingkat kesejahteraan tutor belum memadai;
- Kemampuan profesional para tenaga pengelola Pendidikan Luar Sekolah masih kurang;
- Jumlah tutor belum memadai.

#### 4. Kelompok Belajar:

- Perkembangan kelompok belajar belum di dukung penambahan sarana; dan sering pindah-pindah, belum ada tempat khusus;
- Kurangnya sosialisasi tentang PAUD

### IV. PROGRAM STRATEGIS

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, ditetapkan Program-Program Strategis sebagai berikut, yaitu:

**Tabel 1: Program Strategis Dinas Pendidikan Kota Binjai**

Sasaran Strategis	Program
1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini;	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini;

2	Peningkatan Akses dan Mutu SD/MI, SMP/MTs, serta menurunnya Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah;	2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan);
3	Peningkatan Akses Masyarakat ke Pelayanan Pendidikan yang bermutu dan terjangkau;	3	Program Pendidikan Luar Sekolah
4	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Jenjang SD, SMP.	4	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan

#### F. TARGET ANGGARAN

Rencana Target Belanja Daerah yang dianggarkan Dinas Pendidikan Kota Binjai untuk mendukung Pencapaian Sasaran dan Program Strategis yang akan dicapai pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2: Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2025**

No.	Uraian	Alokasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	212.502.630.605,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.245.039,00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.200.000,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	936.214.250,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.614.472,00
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	43.862.592.660,01
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26.075.801.300,00
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.819.813.477,99

---

10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.534.898.920,00
11	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.996.256.098,00
<b>Jumlah</b>		298.405.266.822,00

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

#### 1.1 Keadaan PAUD

Pada tahun 2025 di Kota Binjai diperkirakan jumlah PAUD kembali mengalami peningkatan secara bertahap menjadi sekitar 213 lembaga negeri maupun swasta, dengan pertumbuhan kelembagaan yang tetap positif, serta capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD yang diproyeksikan meningkat menjadi 74,44% seiring bertambahnya akses dan minat masyarakat terhadap layanan pendidikan anak usia dini.

#### 1.2 Keadaan SD, Paket A

Berdasarkan data pendidikan *Kemendikbudristek* terbaru untuk wilayah Kota Binjai, jumlah Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2025 tercatat sekitar 182 SD (kombinasi negeri dan swasta) jika dihitung dari jumlah SD per kecamatan yakni Binjai Selatan 36, Binjai Kota 23, Binjai Timur 31, Binjai Utara 52, dan Binjai Barat 30 sekolah dasar.

Pada Tahun 2025, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD yang dicapai oleh Kota Binjai adalah sebesar 105,87%, sedikit meningkat dibandingkan dengan APK pada Tahun 2024 yang sebesar 100,12%. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada Tahun 2025 tercatat sebesar 98,83%, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan APM pada Tahun 2024 yang sebesar 97,31%. Kecamatan dengan capaian APK tertinggi pada Tahun 2025 adalah Kecamatan Binjai Utara dengan persentase 91,28%, sedangkan kecamatan dengan capaian APK terendah adalah Kecamatan Binjai Kota yang tercatat sebesar 90,30%. Untuk APM, kecamatan dengan capaian tertinggi adalah Kecamatan Binjai Utara dengan 87,54%, dan yang terendah adalah Kecamatan Binjai Kota dengan 83,12%. Terkait dengan Angka Putus Sekolah di SD/Paket A pada Tahun 2025, tercatat ada 5 siswa yang putus sekolah.

Jumlah guru SD di Kota Binjai hingga Tahun 2025 mencapai 2.152 orang, yang tersebar di seluruh SD. Dari jumlah guru tersebut, 1.983 orang sudah memenuhi kualifikasi S1 atau D IV, yang berarti 92,13% guru di Kota Binjai sudah memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan, sementara 169 guru atau 7,87% belum memenuhi kualifikasi S1. Berdasarkan status akreditasi SD pada Tahun 2025, terdapat 70 sekolah yang

terakreditasi A (40,37%), 84 sekolah terakreditasi B (47,22%), 14 sekolah terakreditasi C (7,82%), dan ada 8 sekolah yang tidak terakreditasi (4,59%). Dalam hal rasio, pada Tahun 2025 rasio guru dan murid tercatat 1:27, yang sedikit lebih baik dari rasio pada tahun sebelumnya. Adapun untuk rasio ruang belajar dan buku per siswa, masih dalam batas yang memadai sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku di Kota Binjai.

### **1.3 Keadaan SMP, Paket B**

Pada Tahun 2025, jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Binjai tercatat sebanyak 59 unit, dengan tambahan 2 unit dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah Paket B juga meningkat menjadi 7 kelompok. Sedangkan jumlah siswa SMP di Kota Binjai pada tahun 2025 mencapai 15.275 siswa, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 14.910 siswa. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP pada Tahun 2025 tercatat sebesar 101,25%, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan APK pada Tahun 2024 yang sebesar 99,32%. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP pada Tahun 2025 mencapai 99,51%, sedikit meningkat dibandingkan APM pada Tahun 2024 yang sebesar 99,01%. Kecamatan dengan capaian APK tertinggi pada Tahun 2025 adalah Kecamatan Binjai Kota yang mencapai 105,25%, sedangkan kecamatan dengan capaian APK terendah adalah Kecamatan Binjai Selatan yang tercatat sebesar 84,50%. Untuk APM, kecamatan dengan capaian tertinggi adalah Kecamatan Binjai Kota dengan 98,75%, dan kecamatan dengan capaian terendah adalah Kecamatan Binjai Selatan dengan 78,20%. Angka Putus Sekolah SMP pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 5 siswa.

Jumlah guru SMP di Kota Binjai pada Tahun 2025 sebanyak 1.025 orang, yang tersebar di seluruh SMP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 960 guru atau 93,76% sudah memenuhi kualifikasi D4/S1, sementara 65 guru atau 6,24% belum memenuhi kualifikasi S1. Mengenai status akreditasi SMP, pada Tahun 2025, sebanyak 23 SMP terakreditasi A (39,00%), 20 SMP terakreditasi B (33,90%), 8 SMP terakreditasi C (13,56%), dan 8 SMP lainnya belum terakreditasi (13,56%). Dalam hal rasio, pada Tahun 2025, rasio guru dan murid tercatat 1:27, sedikit lebih baik dibandingkan dengan rasio pada Tahun 2024 yang sebesar 1:28. Selain itu, rasio ruang belajar dengan murid, tutor dengan peserta Paket B, dan buku dengan murid juga menunjukkan angka yang seimbang, mendukung kualitas pendidikan di tingkat SMP Kota Binjai.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
	<b>Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>Poin</b>	<b>76.03</b>	<b>78,06</b>	<b>102,66%</b>
1		Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	11,41	11,16	97,81%
2		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,03	9,93	70,78%
3		Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	34,55	25,72	74,44%
4		Angka Partipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,20	98,06	98,83%
5		Angka Partipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	%	84,75	84,34	99,51%
6		Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,66	99,64	99,97%
7		Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	76,15	99,5	103,66%
8		Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	%	0,002	0,002	100%
9		Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	0,0015	0,0015	100%
10		Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Paket A	%	99,88	99,86	99,97%
11		Angka Melanjutkan (AM) Dari SMP/MTs Paket B	%	99,72	99,70	99,97%
12		Penduduk yang Berusia $\geq$ 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	%	99,70	99,70	100%

13		Jumlah Muatan Lokal Kurikulum (Seni Budaya)	Yang dalam (Seni)	Angka	3	3	100%
14		Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Yang	Orang	3.538	3.047	86,12%
15		Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	Guru memiliki	%	86,60	91	105,08%
16		Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar (SD/MI)	Murid Pendidikan Dasar (SD/MI)	Rasio	01: 20	01: 25	100%
17		Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Menengah (SMP/MTs)	Murid Pendidikan Menengah (SMP/MTs)	Rasio	01:20	01: 25	100%
18		Rasio Guru/Murid Per kelas Rata Rata Sekolah Dasar (SD/MI)	Murid Rata Rata Sekolah Dasar (SD/MI)	Rasio	01:28	01: 28	100%
19		Rasio Guru/Murid Per kelas Rata Rata Sekolah Menengah (SMP/MTs)	Murid Rata Rata Sekolah Menengah (SMP/MTs)	Rasio	01:32	01: 28	100%
20		Persentase Sekolah PAUD yang memiliki Izin	Sekolah yang memiliki Izin	%	99,2	100	100,81%
21		Persentase Sekolah SD/MI yang memiliki Izin	Sekolah yang memiliki Izin	%	90,11	99,8	110,70%
22		Persentase Sekolah SMP/MTs yang memiliki Izin	Sekolah yang memiliki Izin	%	90,11	99,9	110,86%

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TIAP SASARAN

### 1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pertama

#### **Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Usia Dini;**

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Usia Dini dilihat dari jumlah sarana dan prasarana berupa alat bermain bagi Penyelenggara PAUD, TK, Kelompok Bermain, SPS (Satuan PAUD Sejenis), TPA (Tempat Penitipan Anak) yang ada di Kota Binjai dibandingkan dengan jumlah siswa Usia Dini. Target

pemberian Bantuan Alat Bermain adalah Kelompok Bermain, sehingga sarana dan prasarana dapat terpenuhi secara optimal. Capaian Kinerja Sasaran Pertama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1  
Indikator Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1 Terselenggaranya Pembinaan dan Motivasi PTK PAUD Non Sertifikasi	Tutor	600	449	74,83%

## **2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kedua**

Peningkatan Akses dan Mutu SD, SMP, serta menurunnya Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar.

Capaian Kinerja Sasaran Kedua diukur dengan 10 indikator kinerja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2  
Indikator Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1 % Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	99,22%	98,06%	98,83%
2 % Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,22%	98,06%	98,83%
3 % Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,002%	0,002%	100%
4 % Angka Kelulusan SD/MI	%	100%	100%	100%
5 % Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	%	99,88%	99,86%	99,97%

6	% Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	84,75%	84,34%	99,51%
7	% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	84,75%	84,34%	99,51%
8	% Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,0015%	0,0015%	100%
9	% Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100%	100%	100%
10	% Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/MA, SMK	%	99,72%	99,70%	99,97%

### 3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Ketiga

Meningkatkan kualitas siswa serta meningkatkan daya serap pada jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Capaian Kinerja Ketiga diukur dengan satu indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Indikator Kinerja Sasaran 3**

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1	Persentasi siswa yang diterima pada jenjang yang lebih tinggi	%	100%	100%	100%

### 4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Keempat

Peningkatan Kapasitas Manajemen bagi Pendidikan Dasar, Capaian Kinerja keempat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Indikator Kinerja Sasaran 4**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1 Menurunnya Angka Putus Sekolah SD /MI	Orang	0,002	0,002	100%
2 Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Orang	0,0015	0,0015	100%

#### **5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kelima**

Meningkatkan kualitas siswa serta meningkatkan daya serap pada jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Capaian Kinerja kelima diindikasikan dengan dengan satu indikator kinerja sebagaimana tertera pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**Indikator Kinerja Sasaran 5**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1 Persentasi siswa yang diterima melalui seleksi	%	100%	100%	100%

#### **6. Analisis capaian kinerja Sasaran Keenam**

Peningkatan Pelayanan Prasarana dan Sarana dan Untuk SD, SMP Demi Terwujudnya Standart Pelayanan Minimal. Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.6**  
**Indikator Kinerja Sasaran 6**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1 Setiap SD, SMP menyediakan Buku Teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	%	100%	100%	100%
2 Setiap SD/SMP menyediakan satu set alat peraga pembelajaran.	%	100%	100%	100%

**7. Analisis capaian kinerja Sasaran Ketujuh**

Peningkatan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan yang bermutu dan Terjangkau. Capaian Kinerja sasaran ketujuh dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.7**  
**Indikator Kinerja Sasaran 7**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1 Guru dapat menerapkan kurikulum merdeka belajar sesuai ketentuan yang berlaku.	%	100%	100%	100%
2 Guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar siswa.	%	100%	100%	100%

**Tabel 1.8**  
**Indikator Kinerja Sasaran 8**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1 Terpenuhinya Akses Pendidikan Dasar dan Pemenuhan Sarana dan Prasana Pendidikan Dasar .	%	100%	100%	100%

- **Kondisi Pendidikan**

Pendidikan adalah Suatu Kebutuhan Hidup Setiap Manusia, dengan melalui Pendidikan, Manusia dapat dengan cepat merubah Situasi dan Kondisinya.

Dalam membangun bidang apa saja diperlukan manusia yang cerdas dan terampil, untuk mendapatkan hal tersebut dilakukan dengan Proses Pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh masyarakat adalah melalui Pendidikan Formal dan Pendidikan Non formal, Hal tersebut adalah merupakan Tanggungjawab Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Dalam rangka menghadapi Era Globalisasi Pendidikan di Kota Binjai terus ditingkatkan baik dari segi Kualitas Pendidikan, Kebutuhan Tenaga Pendidik, Kebutuhan Sarana Belajar Mengajar, Sarana Gedung dalam usaha Peningkatan Prestasi.

Bagi siswa yang kurang mampu melanjutkan ke Sekolah Formal, Dinas Pendidikan Kota Binjai membuka Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP. Bagi warga belajar Paket A dan B setelah mengikuti Ujian Nasional dapat melanjutkan ke Sekolah Formal yang lebih tinggi. Untuk menunjang hal tersebut. Pemerintah Kota Binjai telah berupaya untuk meningkatkan taraf hidup yang sejahtera melalui Pendidikan.

**C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2025  
adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1  
Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025**

No.	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)	Sumber Dana
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0		APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	212.502.630.605,00	235.269.369.879,38	100%	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.245.039,00	233.223.039,00	81,48%	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.200.000,00	464.200.000,00	100%	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	936.214.250,00	936.214.250,00	100%	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.614.472,00	646.614.472,00	100%	APBD
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	43.862.592.660,01	48.944.295.823,50	100%	APBD / APBN
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26.075.801.300,00	26.577.031.748,00	100%	APBD / APBN
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.819.813.477,99	5.146.779.344,00	88,44%	APBD / APBN
10	Pengelolaan Pendidikan	3.534.898.920,00	2.868.409.529,00	81,15%	APBD / APBN

	Nonformal/Kesetaraan				
11	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.996.256.098,00	4.785.577.663,00	95,78%	APBD
<b>Jumlah</b>		298.405.266.822,00	325.871.715.747,88		

#### **D. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui Pencapaian Realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Dinas Pendidikan Kota Binjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diberi wewenang untuk mengelola pendidikan di Kota Binjai telah mengemban tugasnya dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan program, serta visi dan misi.

Dari data hasil pengukuran kinerja yang terdapat menunjukkan pelaksanaan kegiatan mencapai tingkat keberhasilan yang baik dengan memperhitungkan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan tersebut.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan kegiatan, diterapkannya kebijakan-kebijakan:

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan di Tingkat Pendidikan Dasar;
2. Mengoptimalkan Manajemen Pendidikan Dasar;
3. Peningkatan Kreativitas, Bakat dan Kemampuan Siswa;
4. Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah;
5. Optimalisasi pendayagunaan tenaga pendidik dan kependidikan;

6. Mengoptimalkan sarana dan parasara yang ada serta Sarana dan Prasarana sekolah.

Hal-hal yang menghambat keberhasilan antara lain:

1. Kurangnya koordinasi antar sekolah dengan Dinas Pendidikan sehingga terhambatnya laporan laporan keuangan yang berakibat pada lambatnya penyampaian laporan SPJ;
2. Kurangnya sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Pendidikan sehingga menghambat administrasi perkantoran;
3. Kurang memadainya pendataan sehingga dapat menghambat penyaluran bantuan/subsidi bagi kesejahteraan guru;
4. Kurangnya pelatihan bagi guru bidang studi sehingga sasaran untuk mebantu pengembangan belajar siswa tidak optimal.

#### **E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Untuk menghadapi berbagai masalah yang datang baik dari lingkungan intern dan ekstern , dibawah ini akan diuraikan strategi pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program Strategi Tahun 2025 antara lain:

1. Untuk mendukung kelancaran program yang telah ditetapkan sebagaimana telah dirinci dari berbagai kegiatan, diusahakan agar koordinasi antar Dinas Pendidikan dan sekolah lebih disinkronkan lagi;
2. Mengingat sarana dan prasarana sangat mendukung berjalannya roda administrasi perkantoran, maka diupayakan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasaran yang ada, penataan arsip-arsip di lingkungan Dinas Pendidikan;
3. Diperlukan penataan perencanaan program yang lebih memadai yang dituangkan dalam program untuk tahun kedepan untuk dapat menciptakan pelayanan adminstrasi dan pendataan guru dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan;
4. Diperlukan pelatihan/workshop bagi guru mata pelajaran dalam bentuk kegiatan yang diprogramkan untuk tahun kedepan, sehingga guru-guru dapat membantu siswa dalam pengembangan cara belajar yang efektif.

## BAB IV PENUTUP

Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 6239/IX/6/Y/2004, tanggal 25 Maret 2004 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kota Binjai telah menerapkan LAKIP sebagai Media Pertanggung Jawaban.

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang baik diharapkan :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi;
2. Sebagai umpan balik untuk Peningkatan Kinerja;
3. Peningkatan Perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi;
4. Meningkatkan Kredibilitas Instansi;
5. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam melaksanakan tugas;
6. Mendorong Instansi Pemerintah untuk bekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
7. Menjadikan Instansi Pemerintah yang Akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
8. Setiap Instansi Pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu, oleh karena itu setiap Instansi Pemerintah diharapkan membantu Kepala Daerah agar dapat mempertanggung jawabkan kepada Publik melalui Lembaga Perwakilan DPRD.

Beberapa hal yang harus mendapat perhatian guna meningkatkan Kinerja dalam tahun mendatang menuju terwujudnya sasaran, tujuan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Mengintensifkan Inventarisasi Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Binjai dalam usaha meningkatkan Mutu Pendidikan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) dikalangan Pegawai Dinas Pendidikan Kota Binjai, baik dengan Edukatif ataupun Tenaga Administratif dalam usaha

mendukung Program Kota Binjai menuju Kota yang Mandiri, Damai, dan Sejahtera serta Berwawasan Lingkungan.

2. Mengadakan Koordinasi dengan Pihak terkait serta Komite Sekolah dan Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan Mutu pendidikan.
3. Mengoptimalkan Sarana dan prasarana yang ada disekolah masing-masing dalam usaha meningkatkan Usaha Kegiatan Belajar Mengajar.
4. Mengadakan Sosialisasi terhadap kalangan masyarakat untuk menyampaikan beberapa informasi terhadap Sistem Pendidikan serta usaha-usaha meningkatkan kualitas Pendidikan khususnya di Kota Binjai.
5. Melaksanakan Kajian mendalam di Bidang Pendidikan untuk melahirkan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan, baik Pendidikan Formal atau dari TK sampai dengan SMP di Kota Binjai.
6. Mengisi Kekosongan akan tenaga-tenaga guru yang dibutuhkan baik SD dan SMP di Kota Binjai.
7. Meningkatkan kualitas Penyusunan LAKIP pada seluruh unit kerja Eselon II di Jajaran Pemerintah Kota Binjai serta memanfaatkannya sebagai media untuk meningkatkan secara bertahap Kinerja Organisasi dengan penyempurnaan dengan berbagai program dan kegiatan yang akan dijalankan.

Dinas Pendidikan Kota Binjai menetapkan Tujuan Strategis berdasar Visi, Misi dan Faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kota Binjai yang merupakan bagian Integral dalam Proses Perencanaan Strategic Organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.